

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Skripsi ini bertujuan mengungkap enigma inersia kuasa global Amerika Serikat (AS) melalui *War On Terror*. Ia merupakan “misteri dibalik misteri” dalam pemaknaan diskursus kekuasaan. Derrida menyebutnya sebagai persembunyian makna kebenaran dibalik teks. Aporia diskursus *War On Terror* secara berlebihan menundukan warga dunia pada konstruksi pengetahuan yang keliru bahkan menyesatkan, sehingga studi ini akan menggali kepatuhan berlebihan atas diskursus tersebut.

Menariknya, setiap orang di dunia baik secara sadar maupun tidak sadar melakukan persetujuan atas penggiringan pemaknaan, sehingga terorisme dispesifikasikan pada kelompok tertentu saja. Pengungkapan bagian inilah yang menjadi kebaruan dalam disiplin ilmu hubungan internasional, di mana kebutuhan akan pemaknaan ditentukan oleh relasi kuasa dan pengetahuan. Tanpa relasi kekuasaan, pengetahuan tidak ada makna, sebaliknya tanpa relasi pengetahuan, kekuasaan tidak ada kuasa.

Pendisiplinan pengetahuan terhadap populasi dalam promosi *War On Terror* sudah dilakukan sejak 9/11. Kendati demikian, akan dilakukan penelusuran secara genealogi terkait diskursus terorisme pada kawasan yang lebih spesifik dan menegangkan yaitu Asia Tenggara. Ia akan dianalisis menggunakan pemikiran Michel Foucault mengenai pendisiplinan pengetahuan demi melakukan

pengontrolan perilaku pada populasi masyarakat Asia Tenggara. Singkatnya, riset ini berfokus terhadap rezim kekuasaan dan pengetahuan *War On Terror*.

Pengetahuan dan kekuasaan merupakan dua aspek yang memiliki tubuh yang berbeda namun memiliki identitas yang serupa dalam pembentukan sebuah rezim kebenaran. Rezim kebenaran ini pada akhirnya ikut andil dalam pembentukan perilaku individu maupun populasi secara tidak sadar. Michel Foucault memperlihatkan bahwa, kebenaran terikat dalam hubungan sirkular dengan sistem kekuasaan yang menghasilkan sekaligus menopang kebenaran, serta dengan dampak kekuasaan yang dihasilkan dan diperluas pada akhirnya menghasilkan sebuah rezim kebenaran (Foucault 1980, 133).

Foucault juga berpendapat bahwa setiap populasi mempunyai rezim kebenarannya sendiri, di mana setiap masyarakat memiliki sistem kebenaran yang berbeda-beda, yang disebut sebagai "politik umum." Sistem ini mencakup jenis wacana yang dianggap benar oleh masyarakat, serta mekanisme dan contoh yang membantu membedakan pernyataan yang benar dan salah. Selain itu, sistem ini juga mencakup teknik dan prosedur yang digunakan untuk menilai kebenaran, serta status seseorang yang dituduh mengatakan sesuatu yang benar (Foucault 1980, 131).

Adanya rezim kebenaran yang berlaku didalam masyarakat dengan kebenarannya sendiri, merupakan sebuah potongan kecil dalam melihat gambaran besar dari sebuah bentuk pendisiplinan yang ingin disampaikan oleh Foucault. Pendisiplinan ini dikenal dengan *governmentality*. Berbanding terbalik dari *disciplinary power* yang mendisiplinkan subjek individu melalui institusi,

*governmentality* mendisplinkan tubuh subjek populasi dalam level negara melalui tiga komponen utama yakni *the governor*, *governance's action*, dan *governance subject*.

Ketiga komponen ini menjadi mesin penggerak utama dalam pola pendisiplinan yang dilakukan oleh negara – negara besar untuk mencapai resistensi tertinggi. Dalam konteks penelitian ini, AS dipercaya melakukan pendisiplinan pengetahuan melalui *War On Terror* sebagai media, yang tidak hanya berusaha untuk mendapatkan legitimasi dari populasi global, namun juga secara terselubung menyisipkan disiplin pengetahuan mengenai makna *terror*. Pendisiplinan ini merupakan mekanisme sistem pemulihan diri terhadap tragedi 9/11, yang aktif ketika dunia mulai mempertanyakan kapabilitas dan eksistensi dari negara dengan identitas *superpower*.

Sebelas September 2001 merupakan peristiwa yang mengguncangkan identitas *superpower* Amerika Serikat. Pada saat itu Gedung Pentagon dan WTC (*World Trade Center*) diserang oleh sekelompok yang dikonstruksikan sebagai *terrorist* yang melakukan pembajakan terhadap 4 pesawat yakni *American Airlines Flight 11*, *American Airlines Flight 77*, *United Airlines Flight 93* dan *United Airlines Flight 175*. Serangan yang dilakukan di WTC mengakibatkan 2.753 orang tewas ketika pesawat dengan nomor penerbangan 11 dan 175 menabrak Menara Utara dan Menara Selatan WTC (Kedang 2017, 22).

Selain itu terdapat juga 343 orang pemadam kebakaran Kota New York, 23 orang lainnya adalah polisi Kota New York, dan 37 lainnya adalah petugas di Otoritas Pelabuhan. Para korban berusia berkisar dua sampai 85 tahun. Sekitar

75-80 persen korban adalah laki-laki (Kedang 2017, 22). Sementara itu pesawat *United Airlines Flight 77* bermanuver ke Gedung Pentagon di Arlington, Virginia yang menewaskan 194 orang termasuk 5 pembajak. Tragedi di Pentagon memicu ketidaksinkronan komunikasi militer untuk merespon serangan yang dilakukan (Arkin dan Windrem 2016).

Berbeda dengan ketiga pesawat lainnya, *United Airlines Flight 93* tidak dapat mencapai target, yang dipercaya menargetkan simbol hegemon AS yakni *The White House* di Washington DC. Hal ini dikarenakan terjadi konflik antara pembajak dan penumpang yang mengakibatkan pesawat jatuh 20 menit setelah tragedi WTC pertama, di lapangan di Pennsylvania bagian Timur yang menyebabkan seluruh penumpang termasuk awak pesawat dan pembajak tewas. Tragedi ini kemudian menciptakan pertanyaan terhadap intelijen AS yang gagal mengantisipasi, yang secara tidak langsung menunjukkan kelemahan yang tidak seharusnya dimiliki oleh negara (Rahman 2021).

Tidak ingin identitas *superpower* redup, George Walker Bush mewakili AS mengeluarkan pernyataan “Pencarian sedang berlangsung untuk menemukan mereka yang berada di balik perbuatan jahat ini. Saya telah mengarahkan seluruh sumber daya komunitas intelijen dan penegakan hukum kita untuk menemukan mereka yang bertanggung jawab dan membawa mereka ke pengadilan. Kami tidak akan membuat perbedaan antara para teroris yang melakukan perbuatan ini dan mereka yang memberi perlindungan kepada mereka. Amerika dan teman-teman serta sekutu kita bergabung dengan semua yang menginginkan perdamaian dan keamanan di dunia, dan kita berdiri bersama untuk memenangkan perang melawan

terorisme. Ini adalah hari di mana semua warga Amerika dari berbagai lapisan masyarakat bersatu dalam tekad kita untuk keadilan dan perdamaian. Amerika telah berhasil melawan musuh-musuh sebelumnya, dan kita akan melakukannya kali ini. Tidak ada dari kita yang akan pernah melupakan hari ini” (Bush 2001).

Pernyataan Bush ini kemudian menjadi akar dari sebuah bentuk pendisiplinan pengetahuan, tidak hanya terhadap populasi AS namun populasi global. Bush kemudian melanjutkan perannya dengan memberikan wewenang khusus dalam sebuah memorandum rahasia pada 17 September 2001 yang memberikan *Central Intelligence Agency* (CIA) kekuasaan baru dalam penangkapan dan penahanan siapapun yang teridentifikasi sebagai teroris. Hal ini kemudian berujung pada pembentukan jaringan global “*black site*” atau pusat penahanan dan interogasi yang tidak resmi dan rahasia (Council On Foreign Relations 2004).

Berselang sehari setelah pemberian wewenang baru terhadap CIA, kongres pada akhirnya mengizinkan respon militer secara masif. Bush kemudian menandatangani resolusi bersama kongres terhadap penggunaan semua kekuatan yang diperlukan terhadap mereka yang dibalik dan turut andil dalam serangan 9/11. Pada awalnya, pemerintahan Bush menggunakan *Authorization for Use of Military Force of 2001* (AUMF) untuk mengejar Al Qaeda dan Taliban di Afghanistan, kemudian memperluas cakupannya dengan menyertakan kekuatan yang terkait dengan Al Qaeda di seluruh dunia. AUMF kemudian digunakan sebagai dasar untuk tindakan militer AS di setidaknya empat belas negara di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan (Council On Foreign Relations 2004).

Selanjutnya, 20 September 2001 dihadapan sidang gabungan kongres, Bush secara resmi menguraikan kebijakan *Global War on Terror* (GWOT) atau *War On Terror* secara global dan menyatakan pembentukan Kantor Keamanan Dalam Negeri demi mengantisipasi peristiwa yang serupa. Saat yang bersamaan, Bush juga menuntut agar pemerintah Taliban di Afganistan untuk dapat menyerahkan semua anggota Al Qaeda termasuk Osama Bin Laden di wilayahnya sebagai langkah awal dalam proses kontra terorisme. Hal ini kemudian berujung hingga penerapan mekanisme pertahanan kolektif oleh NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) untuk pertama kalinya pada 7 Oktober 2001 (NATO 2001).

Pendisiplinan terhadap “*terror*” juga diperkuat dengan diresmikannya Undang-Undang Patriot yang bertujuan untuk memperkuat respon kontra terorisme pemerintah federal. Undang-Undang ini mencakup ketentuan dalam peningkatan kerja sama antara badan intelijen bersama para penegak hukum meliputi penguatan peraturan perbankan dalam melawan pendanaan teroris serta pembuatan defenisi dan hukum baru terhadap aktivitas teroris yang secara drastis meningkatkan perluasan pengawasan domestik. Akan tetapi Undang-Undang ini mendapatkan respon berbeda dari publik dikarenakan laporan pers mengungkapkan bahwa terjadinya pengumpulan secara masif terhadap catatan telpon penduduk Amerika oleh *National Security Agency* (NSA) sehingga menciptakan batasan baru pada pengawasan domestik (Siddiqui 2015).

Tidak hanya dalam aspek militer, pada bidang transportasi juga tidak terlepas dari pendisiplinan. Pada 19 November 2001 Bush menandatangani pembentukan *Transportation Security Administration* (TSA) yang bertanggung jawab atas

keseluruhan normalisasi yang terjadi di bandara diseluruh dunia. Perubahan tersebut merujuk pada peluncuran sejumlah prosedur dan pembatasan keselamatan para penumpang baru, hal ini awali dengan tindakan percobaan pengeboman sepatu yang dilakukan oleh Richard Reid pada bulan Desember 2001 (TSA 2001).

Peristiwa Richrad Reid mendorong berbagai reformasi peraturan baru dalam hal penerbangan meliputi pemeriksaan bagasi, pemeriksaan seluruh tubuh termasuk sepatu, *pat-down*, pembatasan cairan, peningkatan pengawasan terhadap barang elektronik pribadi, dan pembatasan pergerakan dalam penerbangan. Tidak hanya terhadap benda saja, namun beberapa perilaku, sifat dan penampilan telah dikategorikan dalam dokumen “Laporan Rujukan Spot” untuk diwaspadai orang dengan kategori tertentu seperti menguap berlebihan, menatap kebawah, wajah pucat karena baru saja mencukur jenggot, dan menggunakan pakaian yang tidak pantas untuk lokasi di bandara (Winter dan Currier 2015).

Hal ini dibenarkan dengan pernyataan dari salah satu *Behavior Detection Officer Manager* yang menyatakan bahwa “Indikator SPOT digunakan oleh penegak hukum untuk membenarkan penyingkiran siapa pun yang dianggap mencurigakan oleh petugas, daripada bertindak sebagai daftar periksa sebenarnya untuk indikator tertentu” (Currier 2015). Penyingkiran ini diketahui juga mengaktifkan kembali penggunaan teluk Guantanamo untuk tersangka yang teridentifikasi sebagai teroris, dan sejak tahun 2002, sekitar 780 tawanan telah mengalami penahanan di fasilitas militer ini dengan jumlah saat ini yang tersisa yakni 30 tersangka (The New York Times 2023).



Guantanamo sendiri merupakan sebuah fasilitas penahanan yang pada awalnya digunakan dengan tujuan penahanan tersangka pejuang Al Qaeda dan Taliban yang diamankan di Afganistan. Akan tetapi setelah terjadi peristiwa 9/11 dan hadirnya GWOT, Guantanamo mengambil peran kembali menjadi pusat penahanan, isolasi, dan penyiksaan terhadap tersangka yang berada dibalik 9/11 yang dilakukan oleh CIA untuk mendapatkan informasi. Fasilitas ini kemudian mendapatkan perhatian dunia internasional dikarenakan metode yang dilegalkan oleh CIA seperti *waterboarding* yang mendapatkan persetujuan dari pemerintahan AS.

Peraturan, kebijakan, hukum, pengawasan, dan bahkan propaganda yang mengatasnamakan *War on Terror*, dapat diklaim sebagai tindakan pendisiplinan yang dilakukan oleh AS. Hal ini patut di telusuri dikarenakan ketidaksadaran kita yang terdisiplinkan ketika memaknai kata "*terror*," yang seketika berimajinasi terhadap satu bentuk karakter tertentu. Dalam konteks ini, penelitian ini juga berusaha mengkaji pendisiplinan yang dilakukan AS sehingga tidak terjadi penolakan dan justru menciptakan kepatuhan global terhadap kebijakan GWOT yang ditandai dengan lahirnya pengadopsian kebijakan tersebut seperti ASEAN *Convention On Counter Terrorism*.

Sebelum terjadinya 9/11, kawasan Asia Tenggara telah menjadi tempat yang dipanggil "rumah" oleh beberapa kelompok militan Islam pribumi selama beberapa waktu silam. Akan tetapi kelompok militan ini belum berevolusi untuk dapat dianggap sebagai suatu ancaman, sebagian besar kelompok beraktivitas di pulau-pulau terpencil dengan motivasi domestik seperti promosi dalam penerapan *syariah*



(Vaughn, et al. 2005, 3). Filipina adalah salah satu kasus unik, dikarenakan telah menjadi tempat tindakan separatis terhadap kelompok Muslim selama se-abad, meliputi Moro Mindanao dan Kepulauan Sulu serta Pulau Jojo. Peristiwa Pulau Jojo dikenal dengan aksi pemberontakan yang berdarah dan keras namun berakhir menyedihkan, ketika melawaan penjajahan Amerika pada 1898 (Vaughn, et al. 2005, 3).

Sementara itu, di Indonesia hadir dengan berbagai corak warna paradigma Islam yang saling bersaing demi mendapatkan keuntungan dalam pandangan publik. Selain itu, terdapat juga kelompok tertentu yang mempunyai sifat ekstremisme yang berakar dari gerakan anti-Belanda, yang secara efektif dikendalikan penuh oleh Presiden Sukarno dan terutama Suharto (Vaughn, et al. 2005, 3).

Kelompok ini ditandai dengan dibentuknya secara legal kelompok Islam moderat pada rezim Suharto. Semenjak berakhirnya rezim Suharto pada 1998 dan naiknya Abdurrahman Wahid serta Amien Rais yang merupakan pemimpin dari dua partai politik Muslim terbesar, dengan tujuan dalam mengejar agenda politik sekuler. Pengejaran agenda sekuler ini justru tidak terlalu berefek besar terhadap masyarakat Indonesia, dan sejak jatuhnya Suharto, kesadaran beragama telah meningkat terkhususnya di kalangan Islam Indonesia, yang memberikan sebuah ruang politik yang cukup besar bagi kelompok yang bersifat radikal yang menggunakan kekerasan secara terbuka (Vaughn, et al. 2005, 3).

Tahun 1990-an merupakan tahun awal kemunculan kelompok gerakan radikal yang lebih ekstrim di Asia Tenggara, yang dikonstruksikan sebagai “teroris.”

Kemunculan ini ditandai dengan fenomena globalisasi yang sering kali dikaitkan dengan elit regional AS, kemudian dengan penolakan terhadap penindasan oleh pemerintah yang bersifat sekuler, yang menghalangi hasrat dan tujuan dari kelompok ini demi menciptakan Asia Tenggara yang bersatu dalam Islam (Vaughn, et al. 2005, 4).

Tujuan mulia ini kemudian mendapatkan perhatian dari para kelompok veteran di Afganistan yang turut ikut berperan. Para veteran ini tidak hanya membawa pengalaman bertempur namun juga ideologi ekstremis ke wilayah Asia Tenggara. Ideologi dan daya tempur inilah yang menjadi kontribusi besar dalam pertumbuhan gerakan radikal Islam di Asia Tenggara. Percikan ini kemudian menciptakan sebuah relasi kerja sama antara Al Qaeda dengan kelompok radikal Islam yang berada di kawasan Asia Tenggara (Vaughn, et al. 2005, 4).

Relasi kerja sama antara Al Qaeda dan kelompok radikal Islam di Asia Tenggara ini, memicu kemajuan yang cukup signifikan, kerja sama ini didasarkan terhadap operasional Al Qaeda di Asia Tenggara yang difondasikan ke dalam tiga tugas utama. Pertama Al Qaeda mempunyai peran dalam mendirikan sel-sel lokal yang kemudian setiap sel akan dipimpin oleh salah satu anggota Al Qaeda dari Arab, sel ini bertujuan sebagai kantor yang dapat mendukung pemaksimalan operasi global Al Qaeda (Vaughn, et al. 2005, 4). Dengan memanfaatkan pengontrolan yang lemah pada area perbatasan, Al Qaeda dapat melakukan koordinasi demi peluncuran serangan terhadap targetnya yakni “Barat.” Kemudian sel-sel ini dapat melakukan perpindahan operatif secara fleksibel serta berfungsi

sebagai tempat perlindungan bagi mereka yang berusaha untuk melarikan diri dari intelijen AS (Vaughn, et al. 2005, 4).

Sel-sel yang didirikan di Manila menjadi salah satu sel yang paling aktif pada awal tahun 1990-an di Asia Tenggara. Sel di Manila didirikan oleh saudara ipar Osama bin Laden, yang kemudian menjadi lebih aktif ketika Ramzi Yousef yang melarikan diri ke Manila setelah mengkoordinasikan pengeboman *World Trade Center* di New York pada tahun 1993. Sel tersebut merencanakan peledakan terhadap 11 pesawat dalam kurun waktu dua hari yang dikenal dengan operasi “Bojinka,” yang direka kembali oleh teroris ke markas besar CIA, mengadakan pembunuhan terhadap Paus yang melakukan kunjungan ke Filipina pada tahun 1995 (Vaughn, et al. 2005, 4).

Keaktifan Yousef di Manila ini, diketahui dibantu oleh pamannya yang disebut sebagai tersangka dibalik kejadian 11 September 2001, yakni Khalid Sheikh Mohammed. Dikarenakan sel di Manila mulai menjadi perhatian dunia internasional, pada akhir tahun 1990-an, aktivitas Al Qaeda di kawasan Asia Tenggara secara signifikan mulai berpindah lokasi ke Malaysia, Singapura, dan yang paling baru yakni Indonesia (Vaughn, et al. 2005, 4).

Setelah Manila, Kuala Lumpur dan Bangkok menjadi dua lokasi yang paling sering digunakan Al Qaeda untuk melakukan pertemuan, yang dipercaya pertemuan tersebut demi mengkoordinasikan penyerangan 11 September. Para petinggi Al Qaeda juga menggunakan kendala peraturan keuangan yang kurang ketat di Asia Tenggara untuk memanfaatkan sejumlah negara di Asia Tenggara sebagai lokasi

demi mengumpulkan, mengirim, dan tentunya menyembunyikan dana jaringan mereka.

Tugas kedua Al Qaeda, seiring melihat perkembangan dinamika operasional yang telah dilakukan, Al Qaeda bertugas untuk menciptakan jaringan teroris yang secara terpisah berbasis sebagai jaringan teroris regional autentik pertama di Asia Tenggara yang sekarang dikenal dengan Jemaah Islamiyah (JI) yang juga menargetkan Barat (Vaughn, et al. 2005, 5). Sekalipun telah menjadi kelompok yang independen dengan bantuan Al Qaeda, JI tidak secara langsung tunduk terhadap Al Qaeda namun menentukan posisinya agar dapat sejajar dalam hubungan kerja sama yang dilakukan.

Peran terakhir dari Al Qaeda yakni mendorong sel-sel lokal untuk dapat menjalin kerja sama dengan kelompok Islam radikal pribumi melalui bantuan pelatihan dan finansial. Sampai dibubarkannya pada pertengahan tahun 1990-an, sel Manila Al Qaeda memberikan bantuan keuangan yang luas kepada militan Moro seperti Abu Sayyaf *Group* dan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) (Vaughn, et al. 2005, 5). Dengan pelatihan yang telah dilakukan terhadap berbagai militan di kamp Al Qaeda yang berpusat di Afganistan dan kamp lokal Indonesia, Malaysia, dan di Filipina berujung pada peningkatan kekuatan tempur yang signifikan dengan total kekuatan sekitar satu per lima kekuatan Al Qaeda yang bertumpuk di Asia Tenggara.

Penumpukan ini diketahui bahwa Al Qaeda memberikan sejumlah dana dan pelatihan terhadap kamp yang dioperasikan oleh kelompok lokal yang berfondasi di Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Tidak hanya itu saja, Al Qaeda juga ikut

berperan dalam perang berdarah dengan mengirim pejuang untuk berpartisipasi dalam serangan terhadap kaum Kristen di Maluku dan Sulawesi pada tahun 2000 (Vaughn, et al. 2005, 5). Operasional ini dilakukan juga dengan perpaduan dari JI bersama dengan organisasi Jihad yang dibentuk untuk membela kepentingan umat Muslim di kepulauan Indonesia (Chalk, et al. 2009, 96).

Lancarnya pertumbuhan teroris di Asia Tenggara disebabkan oleh beberapa faktor seperti dukungan dari aktor regional lain meliputi Libya yang telah menjadi pendukung sejak tahun 1970-1980an, dikarenakan partisipasi kelompok radikal dari Asia Tenggara yang berperang sebagai Mujahidin di Afganistan. Kemudian dengan pengontrolan pemerintah pusat yang sangat lemah, tingkat korupsi yang cukup besar, perbatasan dengan tingkat keamanan yang sangat lemah, persyaratan visa yang tidak dikelola dengan cukup ketat, pengendalian dan jaringan yang luas dari lembaga amal Islam di negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Filipina justru membantu pertumbuhan dan evolusi dari konstruksi teroris di Asia Tenggara (Vaughn, et al. 2005, 5).

Seiring berjalannya waktu, keberadaan Al Qaeda di kawasan tersebut telah menyebabkan kelompok-kelompok lokal semakin profesional dan menjalin hubungan di antara mereka dengan Al Qaeda, sehingga mereka dapat berkerjasama layaknya demokrasi. Dalam banyak kasus, kerja sama ini bersifat sementara dan praktis, seperti membantu dalam pengadaan senjata dan bahan peledak. Relasi ini tetap bertahan sampai dengan terjadinya peristiwa 11 September yang mengguncang sisi keamanan internasional dan kembali menempatkan permasalahan mengenai teroris sebagai topik utama.

Setelah 11 September 2001, kelompok-kelompok radikal mulai dikenal luas dengan kontruksi julukan sebagai “teroris.” Al Qaeda merupakan salah satu kelompok yang dicurigai, akan tetapi penelusuran yang dilakukan mengungkapkan relasi jaringan kerja sama teroris yang luas bersama JI yang sudah secara independen mempunyai mekanis yang sama dengan mendirikan sel-sel di Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina, Australia, Thailand, dan Pakistan (Vaughn, et al. 2005, 5). Dengan tujuan pembentukan negara Islam pada kawasan Asia Tenggara dengan pusatnya di Indonesia.

Seperti yang dilakukan Al Qaeda, JI juga menggunakan mekanisme yang sama dengan memulai hubungan kerja sama dengan kelompok militan Islam lainnya. Hubungan kerja sama antar jaringan teroris JI bersama kelompok militan Islam didasarkan terhadap penyediaan sumber daya baik dalam pelatihan, senjata, bantuan finansial, dan koordinasi mengenai serangan yang akan dilakukan. Hubungan kerjasama ini tidak hanya bersama kelompok radikal yang berasal dari Indonesia, namun JI juga diketahui terlibat dalam operasi pelatihan bersama MILF di Filipina (Vaughn, et al. 2005, 6). Kelompok yang dilatih ini kemudian terlibat dalam konflik di pulau-pulau terluar Indonesia dan Filipina.

Setelah tragedi 12 Oktober 2002 di Bali, JI secara resmi dilabelkan oleh AS sebagai entitas radikal teroris. Pelabelan ini juga ditandai dengan *United Nations Security Council* (UNSC) yang mengkategorikan JI kedalam daftar teroris, sehingga setiap negara anggota harus ikut berperan dalam pemberantasan kelompok ini, melalui pembekuan aset organisasi, mencegah akses pendanaan, serta pencegahan akses masuk dan keluar anggota dari JI (Vaughn, et al. 2005, 6).

Kejadian ini kemudian membatasi pergerakan dari JI, dan sejak 2001 telah diketahui bahwa terdapat 250 anggota JI dan para pemimpin kelompoknya telah ditangkap (Vaughn, et al. 2005, 6). Dengan pertukaran intelijen yang lebih luas terhadap aparat keamanan nasional ketika masuk kedalam daftar teroris UNSC, JI juga kembali mendapatkan dorongan ketika pemerintah Indonesia ditekan untuk lebih tegas terhadap persoalan JI.

Semenjak dua serangan tersebut, AS beserta pemerintah regional meningkatkan upaya untuk memerangi terorisme di kawasan Asia Tenggara. AS berperan sangat besar dalam pembentukan kapasitas pemerintah regional dalam mencegah dan merespon aksi teroris yang dilakukan. Sekalipun jaringan JI yang melakukan aksi Bom Bali melemah secara signifikan dikarenakan penangkapan yang dilakukan terhadap anggota dan pemimpinnya, terdapat kelompok ekstrims lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Abu Sayyaf di Filipina dan kelompok militan di Indonesia (Vaughn, et al. 2005, 41).

Beberapa tahun kemudian laporan menunjukkan bahwa ancaman yang diberikan kelompok ekstrim ini mulai kembali melonjak. Hal ini disebabkan dengan radikalisasi secara virtual melalui penggunaan media sosial oleh kelompok ekstrim, demi melakukan perekrutan melalui pesan online di kawasan Asia Tenggara (Vaughn, et al. 2005, 46). Merespon hal ini, dibentuklah program yang secara khusus untuk menangani persoalan teroris di Asia Tenggara yaitu *ASEAN Convention On Counter Terrorism*.

Pada tahun 2007 ditandatangani sebuah program yang melibatkan keseluruhan anggota yaitu *ASEAN Convention On Counter Terrorism*. Konvensi ini



berusaha menyuarakan perlawanan terhadap kelompok teroris dengan berbagai cara meliputi pembekuan aset teroris, serta peningkatan pertukaran informasi dan kerja sama di antara negara-negara anggota ASEAN (Vaughn, et al. 2005, 46). Konvensi ini menghasilkan hasil yang cukup memuaskan dalam pemberantasan teroris di Asia Tenggara, akan tetapi ancaman teroris di kawasan ini masih cukup tinggi sehingga menciptakan dilema dalam hal keamanan bagi setiap pemerintah.

Dengan adanya ancaman teroris yang masih cukup tegang dalam perlawanannya terhadap pemerintah pusat baik bagi AS dan negara kawasan Asia Tenggara, dan hadirnya program-program seperti GWOT atau *ASEAN Convention On Counter Terrorism* bukanlah untuk menciptakan solusi. Dengan jaringan yang dimiliki oleh teroris, bahkan AS sendiri tidak dapat memerangi dengan maksimal mengenai hal tersebut, sehingga program sebelumnya tidak hanya bertujuan untuk memerangi teroris secara terbuka.

Namun secara terselubung program tersebut menanamkan sebuah diskursus terhadap teroris, sehingga tidak hanya bagi pemerintah, namun bagi keseluruhan masyarakat Asia Tenggara untuk dapat mengimajinasikan makna teror kedalam suatu karakter imajiner yang identik. Hal ini bertujuan agar AS dapat mengontrol perilaku populasi Asia Tenggara.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yakni:

- a) Bagaimana Amerika Serikat berhasil merajut jaringan pendisiplinan pengetahuan melalui *Global War on Terror* ?
- b) Mengapa terjadinya kepatuhan populasi Asia Tenggara melalui narasi *Global War on Terror* ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini muncul dengan hasrat memahami bagaimana Amerika Serikat merajut jaringan yang kuat dalam upayanya mendisiplinkan populasi melalui *Global War On Terror*, dengan fokus tajam pada studi kasus yang memikat di wilayah dinamis Asia Tenggara. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud membedah strategi Amerika Serikat yang tidak kenal lelah dalam mencapai dan mempertahankan momentum inersia dalam peran kekuasaannya di panggung global dalam konteks teror.

Ini adalah eksplorasi yang tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga mengejar pemahaman yang mendalam tentang dinamika kekuasaan dan tindakan negara dalam konteks pengontrolan menggunakan *governmentality* dengan panoptikon sebagai sensornya untuk mengantisipasi variabel yang dapat mengancam eksistensi aset kekuasaannya.

Penelitian ini memiliki capaian lain, yaitu menciptakan fondasi awal yang kokoh untuk analisis dan pemahaman mendalam terhadap fenomena global yang terjadi di seluruh dunia. Sehingga pendekatan yang dilakukan tidak hanya terpaku pada teori dan konsep arus utama dalam studi Hubungan Internasional, tetapi juga membuka jendela lebar terhadap teori-teori alternatif yang berpotensi memberikan

wawasan yang lebih dalam, pandangan yang berbeda, dan dimensi yang lebih kaya terkait dengan fenomena yang identik.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini memberikan sumbangsi atau manfaat dalam dua bentuk, yakni manfaat secara akademi dan manfaat secara praktis.

Penelitian ini berupaya untuk menjelajahi dinamika kekuasaan dan diskursus pengetahuan AS dalam konteks GWOT di Asia Tenggara. Upaya ini dituangkan melalui analisis kritis terhadap kerangka kekuasaan dan diskursus yang mempengaruhi kompleksitas keamanan regional di Asia Tenggara. Dengan demikian akan diuraikan manfaat penelitian secara lebih rinci, termasuk manfaat dalam pengembangan pengetahuan akademis dan manfaat praktis yang relevan dalam konteks kebijakan dan tindakan yang nyata.

##### **1.4.1 Manfaat akademis**

Penelitian ini bermanfaat secara akademis terhadap kontribusi dalam pemahaman teoritis rezim kebenaran, kekuasaan, panoptikon dan mekanisme negara melakukan pengontrolan perilaku melalui *governmentality*. Dengan menyajikan analisis kontekstual yang mendalam mengenai mekanisme dinamika kekuasaan dan konstruksi kebenaran yang beroperasi dalam konteks GWOT di Asia Tenggara akan memberikan wawasan khusus mengenai tantangan yang unik di kawasan ini. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian yang akan

dilakukan dikemudian hari secara mendalam dalam isu dan permasalahan keamanan, terorisme, dan kekuasaan di Asia Tenggara.

Dan terakhir penelitian ini memberikan kontribusi besar terhadap pendidikan dan kesadaran publik. Dengan memicu dialog dan diskusi tidak hanya dalam ranah akademik yang lebih lanjut mengenai topik-topik yang terkait. Yang kemudian berkontribusi dalam program pendidikan tinggi dan pendidikan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang isu keamanan dan terorisme di Asia Tenggara sehingga dapat meningkatkan kesadaran mengenai kompleksitas tantangan yang dihadapi, dan tidak terjerumus dalam pendisiplinan pengetahuan atau diskursus.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis yang dimiliki oleh penelitian ini, yakni berkontribusi terhadap aparat dan lembaga keamanan di Asia Tenggara untuk mempunyai pendalaman yang lebih terhadap dinamika teroris dan bagaimana terorisme tersebut diinterpretasikan secara diskursus berdasarkan rezim kebenaran dan mesin kekuasaan panoptikon yang sedang berjalan.

Penelitian ini juga dapat menjadi tumpuan dasar dalam memberikan fondasi yang lebih kuat dalam perencanaan dan pengimplementasian sebuah kebijakan keamanan yang lebih efektif, dengan mempertimbangkan analisis terhadap diskursus pengetahuan dalam GWOT sehingga berpotensi untuk dapat menciptakan susunan kebijakan yang lebih efektif dalam penanganan ancaman teroris.

Dan terakhir, penelitian ini secara tidak langsung mendorong sebuah bentuk kerjasama yang lebih erat antar negara Asia Tenggara dalam menghadapi ancaman teroris. Dorongan ini didasarkan agar kerjasama yang dilakukan tidak difondasikan

terhadap diskursus ancaman teroris dalam pengadopsian, pendisiplinan, kepatuhan yang disebabkan oleh AS melalui GWOT.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Studi ini terdiri atas 6 bab yang berisi sub-bab disesuaikan dengan pembahasan penelitian ini. Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 berisi revid literatur, kerangka teoritik, operasionalisasi teori, dan hipotesis. Kemudian diikuti dengan metode penelitian, ruang lingkup penelitian, tipe penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik validasi data, dan teknis analisis data. Bab 3 membahas genealogi terorisme. Bab 4 membahas rezim kebenaran *War on Terror*. Bab 5 membahas kekuasaan *governmentality* melalui relasi kuasa pengetahuan dan kekuasaan *War on Terror* di Asia Tenggara. Studi ini akan ditutup pada bab 6 yang berisi kesimpulan dan saran.